

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi Implementasi Kebijakan: Pengendalian dan Stabilisasi Harga *Livebird* Melalui GPS

DASAR PEMIKIRAN

Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diambang kehancuran karena usaha ayam *broiler* (ayam pedaging) terus tertekan dengan harga ayam panen (*livebird*) dibawah Harga Pokok Produksi (HPP). Pada pertengahan bulan Juli 2021 lalu, harga *livebird* di level Rp8.000 per kilogram, sedangkan HPP Rp19.000–21.000 per kg sesuai Permendag No. 7 Tahun 2020. Indikasinya karena pasokan ayam di hulu berlebih, sedangkan permintaan di hilir masih stagnan.

KAJIAN EMPIRIS

Kebijakan pemangkasan produksi (*cutting*) atas intervensi pemerintah dalam rangka menjaga *supply-demand*. Dengan harapan terangkatnya harga ayam hidup (*livebird*) yang selama ini merugikan peternak rakyat. Pasalnya perusahaan besar yang terintegrasi, memiliki keunggulan saponak (DOC dan Pakan) lebih murah dibanding peternak rakyat yang ketergantungan saponak ke perusahaan integrasi. Kebijakan *cutting* diberlakukan harga sesekali stabil, naik bahkan cenderung turun. Juga efeksamping harga DOC, pakan dan jagung juga berfluktuasi. Sehingga menuai pro dan kontra.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Dalam kebijakan *cutting* produksi perlu dilakukan dengan memperhitungkan tingkat konsumsi di masyarakat dengan data yang akurat. Terutama mengenai data pemasukan atau impor DOC GPS *broiler* juga dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi gangguan keseimbangan *supply-demand*.
2. Pemerintah wajib menata dengan baik agar perunggasan memiliki daya saing yang kuat. Sehingga bisa diketahui mana yang harus didorong untuk berkompetisi terutama perusahaan integrator milik korporasi maupun perorangan. Harus segera diproteksi perusahaan perorangan atau peternak mandiri.
3. Pemerintah perlu melakukan pembatasan kuota impor GPS dari luar negeri ke Indonesia. Supaya aktivitas impor dan ekspor ayam GPS bersifat murni bisnis dan tidak ada intervensi teknis yang berlebihan dari pemerintah. Pemerintah hanya memastikan, masuknya GPS tidak membawa penyakit dan selebihnya memberikan izin minimal satu tahun, tanpa ada kuota impor.
4. Semua peternak harus mendapat perlakuan yang sama dengan aturan yang seadil-adilnya. Karena dalam bisnis, efisiensi dan produktivitas merupakan hal terpenting, maka populasi ayam GPS yang diusahakan harus ada jumlah minimalnya. Peternak mandiri harus berhimpun dalam koperasi agar mendapatkan jumlah minimal populasinya sehingga dapat mengajukan kuota GPS sendiri.
5. Pemerintah perlu melakukan pembentukan integrasi horizontal. Para peternak pembudidaya ayam FS harus membentuk koperasi untuk berintegrasi dengan perusahaan tunggal GPS, perusahaan tunggal PS dan perusahaan tunggal pakan.
6. Untuk memperkuat posisi integrasi horizontal, pemerintah dan perguruan tinggi secara institusional perlu membackup pelaku usaha yang berhimpun. Integrasi horizontal dapat berdampingan dengan integrasi vertikal tanpa harus saling menjatuhkan. Keduanya dapat bersinergi untuk mengembangkan peternakan di Indonesia dan meningkatkan daya saing global.
7. Pemerintah harus mengedukasi konsumen sehingga aksesibilitas daging ayam di masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Perlu mempromosikan bersama produk-produk daging asal unggas oleh peternak, akademisi dan pemerintah.
8. Penerapan SE *cutting* harus diimbangi dengan SE Kemendag bahwa pembatasan harga tertinggi DOC FS. Jika tidak maka akan dijadikan alat dominasi kekuasaan bukan alat bantu supaya semua orang bisa beternak dengan baik meskipun tidak untuk besar. Perusahaan “integrator” diharapkan bisa membina peternak *broiler* juga diberikan harga DOC yang wajar.
9. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan selain SE karena SE sudah berjilid-jilid namun tidak ada ujung pangkal kapan berakhir. Jika terulang SE dikeluarkan Kembali maka harus ada yang bertanggung jawab penuh sehingga peternak *broiler* akan tercukupi pasokan DOC dan stabilitas harga *livebird*.